

## PERGULATAN POLITIK KUASA DI BALIK TERBENTUKNYA CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GIANYAR ERA REFORMASI

I Made Artayasa<sup>1</sup>, Ni Wayan Anggreni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Indonesia

<sup>2</sup>Akademi Pariwisata Denpasar

<sup>1</sup>[made.artayasa@unr.ac.id](mailto:made.artayasa@unr.ac.id), <sup>2</sup>[anggreni.28@gmail.com](mailto:anggreni.28@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juisspol.v5i1.4400>

Received: 29 April 2025

Revised: 20 Mei 2025

Accepted: 20 Mei 2025

### Abstrak

Pergulatan politik kuasa dalam penetapan calon kepala daerah kabupaten Gianyar di era reformasi memerlukan proses yang panjang. Empat kali pemilihan kepala daerah di kabupaten Gianyar tidak ada koalisi yang permanen dalam setiap periodenya dan hanya dapat menetapkan dua pasangan calon kepala daerah untuk pemilihan tahun 2008, 2012, 2018 dan 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, pengumpulan dokumen, wawancara yang mendalam, serta melalui penelusuran *online*. Penelitian ini menemukan terjadi dua koalisi, masing-masing dipimpin oleh PDIP dan Golkar. PDIP menggandeng puri Gianyar beserta keluarga besar warih Dewa Manggis Sakti dan Golkar bersama puri Ubud beserta keluarga Dalem Sukawati. Dengan adanya dua pasangan calon kepala daerah menjadikan suhu perpolitikan di kabupaten Gianyar cukup hangat dan menarik. Terjadi pertarungan antar PDIP dengan partai Golkar, puri Gianyar dengan puri Ubud dan pertarungan saudara kandung antara Agung Baratha dengan adiknya Agung Gde Agung. Tokoh-tokoh yang mendapatkan rekomendasi untuk bisa ditetapkan sebagai calon kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari berbagai modal sosial yang mereka miliki.

**Kata Kunci:** Pergulatan Politik kuasa, Calon Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah

### Abstract

The political power struggle in determining the candidate for regional head of Gianyar regency in the reform era requires a long process. Three times in the regional head elections in Gianyar regency, there was no permanent coalition in each period, and only two regional head candidate pairs could be determined for the 2008, 2012, 2018 and 2024 elections. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, document collection, in-depth interviews, and online searches. This research found two coalitions, each led by PDIP and Golkar. PDIP collaborated with Puri Gianyar and the extended family of Warih Dewa Manggis Sakti and Golkar with Puri Ubud and the family of Dalem Sukawati. With two pairs of regional head candidates, the political temperature in the Gianyar district is quite warm and interesting. There was a fight between PDIP and the Golkar party, Gianyar castle and Ubud castle and a sibling fight between Agung Baratha and his younger brother Agung Gde Agung. Figures who receive recommendations to be appointed as regional head candidates cannot be separated from the various social capital they possess.

**Keywords:** Political Power Struggle, Regional Head Candidates, Regional Head Elections

## PENDAHULUAN

Pada era reformasi pemilu dirancang untuk memenuhi hak-hak politik warganya secara bebas tanpa tekanan dari siapapun. Kebebasan diberikan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik sesuai dengan aliran aspirasinya masing-masing. Partai politik yang telah memenuhi syarat-syarat administratif badan hukum dan kepesertaan seperti yang diatur di dalam undang-undang boleh mengikuti pemilu. Menurut Huda dan Nasef (2017: 228) pengaturan pemilu dalam beberapa undang-undang setelah adanya ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut juga tidak memasukkan pemilihan kepala daerah di dalamnya. Kekosongan pengaturan masalah tersebut diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 24 ayat (5) menyebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah di selenggarakan oleh KPU kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang pertama di Kabupaten Gianyar diawali dengan pengumuman dan pendaftaran paket pasangan calon oleh KPU Kabupaten Gianyar mulai tanggal 8-14 Oktober 2007. Pemilihan kepala daerah langsung yang pertama, pasangan Agung Bharata dengan Putu Yudany Thema dikalahkan oleh pasangan Cok Ace dengan Dewa Made Sutanaya. Menariknya pada pemilihan kepala daerah langsung ini Agung Bharata sebagai *Incumbent* di kalahkan oleh pasangan pendatang baru. Sedangkan pemilihan kepala daerah langsung yang ke dua dilaksanakan pada 4 Nopember 2012 Pasangan Agung Bharata dengan I Made Mahayastra menang dengan perolehan suara 69,7 %

mengalahkan pasangan Cokorde Putra Nindya dari puri Peliatan Ubud berpasangan dengan A.A Gde Ngurah dari Puri Gianyar.

Pemilihan kepala daerah langsung yang ke dua terjadi pertarungan antara saudara yaitu A.A. Gde Ngurah sebagai adik kandung Agung Bharata dan juga pertarungan antar puri yaitu Puri Peliatan Ubud bertarung dengan Puri Gianyar. Pemilihan kepala daerah langsung tahun 2018 pasangan I Made Mahayastra yang bukan dari keluarga puri berpasangan dengan A.A. Gde Mayun dari Puri Gianyar mengalahkan pasangan Cokorde Kerthyasa dari Puri Ubud dengan Pande Maharani. Pemilihan kepala daerah langsung tahun 2024 pasangan I Made Mahayastra dan Agung Mayun sebagai pasangan *incumbent* mengalahkan pasangan Agung Kakarsana dari puri Blahbatuh dengan I Wayan Tagel Arjana seorang tokoh politik dari partai Gerindra. Pemilihan kepala daerah langsung kabupaten Gianyar di era reformasi selalu diikuti tokoh-tokoh dari Puri, baik sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah.

Pembentukan pasangan calon kepala daerah pada era reformasi terjadi pergulatan kekuatan yang saling tarik menarik di perpolitikan masyarakat Gianyar. Pergulatan itu terjadi pada pemegang kuasa di organisasi-organisasi formal seperti partai politik maupun *non formal* untuk dapat dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Pergulatan itu sangat kompleks, karena semua unsur kepentingan terlibat, seperti: para elit politik, elit lokal, pers, *prajuru* (pengurus) adat, dan para relawan. Pergulatan politik kuasa terbentuknya pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar di era reformasi menarik untuk dilakukan penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana terbentuknya pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2008, 2012, 2018 dan 2024.

## METODE PENELITIAN

Penelitian pergulatan politik kuasa dibalik terbentuknya pasangan calon kepala daerah Kabupaten Gianyar era reformasi ini sesuai dengan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena terbentuknya pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar tahun, 2008, 2012, 2018 dan 2024. Pengumpulan data awal melalui observasi dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan informan secara mendalam. Informan ditentukan secara *purposive sampling* yaitu karena pengetahuannya tentang pergulatan politik kuasa terbentuknya pasangan calon pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar. Data juga didapatkan melalui dokumen dari KPUD Gianyar dan lembaga lain, serta dikumpulkan secara *online*. Informan dalam penelitian ini antara lain: tokoh-tokoh masyarakat, tokoh puri dan elit politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergulatan politik kuasa terbentuknya pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2008, 2012, 2018 dan 2024.

### **Pergulatan Politik Kuasa dalam Terbentuknya Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2008.**

Partai politik memiliki andil paling besar dalam menjaring calon-calon yang akan dicalonkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Peran tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang merupakan revisi Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota. Dalam Undang-undang, partai politik maupun gabungan partai politik dapat mengajukan bakal calon kepala daerah bila memiliki 20 persen kursi di DPRD maupun 25 persen suara sah perolehan dalam pemilu legeslatif. Artinya bila partai politik memiliki kursi lebih dari 20 persen di DPRD ataupun perolehan suara lebih dari 25 persen. Namun bila tidak, harus bergabung dengan partai lainnya agar memenuhi jumlah kursi 20 persen atau 25 persen suara. Untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar di era reformasi, telah terjadi empat kali pemilihan. Pemilihan kepala daerah tahun 2008, PDIP dengan menguasai 19 kursi di DPRD mengusung sendiri calonnya pasangan Agung Bharata dengan Putu Yudany Tema berhadapan dengan koalisi besar dengan 21 kursi yang dipimpin partai Golkar dengan 10 kursi, PNBK 4 kursi, PPIB 4 kursi, PNI Marhaen 1 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, dan PKPB 1 kursi. Koalisi besar ini mengusung pasangan calon Cok Ace dengan Dewa Made Sutanaya.

### **Pergulatan Terbentuknya Pasangan Agung Bharata dengan Putu Yudany Tema (Bayu)**

Rapat kerja cabang khusus PDIP Kabupaten Gianyar pasangan Agung Bharata dengan Putu Yudany Tema memenangkan *voting* untuk mendapatkan rekomendasi dari ketua umum DPP PDIP, mengalahkan pasangan Dewa Made Wardana dan Dewa Made Sutanaya. Pergulatan politik kuasa dalam mencari dukungan untuk memenangkan *voting* dan mendapatkan rekomendasi DPP partai melalui proses yang cukup panjang setidaknya harus meminta dukungan kepada kader partai yang mempunyai hak suara dalam rapat kerja cabang khusus.

Menurut Foucault yang dikutip Lubis (2014:177), kuasa tidak hanya bekerja melalui intimidasi dan kekerasan

akan tetapi pertama-tama melalui aturan-aturan dan normalisasi. Rekomendasi pusat mutlak diperlukan, karena tanpa tanda tangan ketua umum partai pendaftaran pasangan calon tidak bisa diterima oleh KPUD, jadi sedemikian besar peran DPP partai, sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati/walikota. Pasal 40A menyebutkan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 merupakan partai politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pergulatan Politik Kuasa Terbentuknya Pasangan Cok Ace dengan Dewa Made Sutanaya (AS)**

Tampilnya Cok Ace dalam pemilihan kepala daerah 2008 tidak bisa dilepaskan dari episode lanjutan perjuangan rakyat Gianyar pada pemilihan kepala daerah tahun 2003. Ratusan rakyat pengusung Cok Ace harus gigit jari karena terganjal dalam Rakercabsus PDIP sebagai partai pemilik kursi terbesar di DPRD Gianyar. Setelah lima tahun berlalu sebagai tanggung jawabnya atas permintaan arus bawah yang sedemikian kuat, maka Cok Ace siap melangkah lagi melanjutkan perjuangannya untuk menduduki kursi Gianyar satu. Karena Cok Ace sebagai tokoh non partai, sedangkan untuk mencalonkan diri sebagai Bupati harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Aliansi sejumlah partai kecil yang menamakan diri Aliansi Bhakti Gianyar (ABG) dan Koalisi Santhi Mandala (KSM) akhirnya memining Cok Ace sebagai kandidat Bupati. ABG beranggotakan PPIB, Partai Demokrat, Partai Patriot Pancasila, PDK, Partai Pelopor, dan PKPI. Sedangkan KSM terdiri dari PNBK, PNI Marhaenisme, dan PKPB.

Selanjutnya untuk mempersatukan dan memperkuat posisinya, maka Cok Ace ikut dalam konvensi Golkar yang di gelar 1

September 2008. Kemenangan Cok Ace dalam konvensi Golkar mempersatukan 10 partai sebagai pendukungnya untuk maju sebagai calon Bupati dan menggodok nama-nama yang akan mendampingi sebagai pendampingnya. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya disepakati Dewa Made Sutanaya sebagai calon Wakil Bupati.

Pendaftaran pasangan Ace-Sutanaya secara teknis administrasi hanya Golkar yang mendaftarkan di KPUD Gianyar, namun dalam pelaksanaan dan pencitraanya ke tengah masyarakat tetap dilakukan dengan mengedepankan *independensi* Ace-Sutanaya sebagai kandidat milik rakyat. Dalam buku Jejak Nurani Cok Ace-Sutanaya disebutkan letak seni politik yang harus dimainkan oleh Ace-Sutanaya bersama timnya diawali dengan pembentukan AS Media Center. Bersama tim relawan pemenangan bisa menjadi otak pergerakan yang relatif netral dari kepentingan-kepentingan politik, dengan harapan bisa diterima oleh semua lapisan dan golongan masyarakat. Partai Golkar dan partai-partai yang berada dalam naungan KRG tetap mendapatkan ruang kebebasan untuk bergerak ke tengah masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing.

Diakui atau tidak, mereka pasti memiliki massa fanatik yang riil. Hubungan antara KRG dengan AS Media Center tidak selalu berjalan mulus, karena partai politik yang tergabung dalam KRG berkepentingan untuk menunjukkan eksistensinya kepada publik. Demikian juga AS Media Center ingin mendapatkan pengakuan atas berbagai langkah dan kiprah yang telah dijalankan.

Kecerdasan tim pemenangan Ace-Sutanaya dalam mengelola partai koalisi menjadikan suatu kekuatan, sehingga Agung Baratha sebagai Bupati *incumbent* dapat dikalahkan. Bersatunya sepuluh partai menjadi koalisi besar merupakan penyatuan relasi-relasi kekuasaan yang

tersebar. Foucault yang dikutip Lubis (2014:176), kekuasaan menurutnya bukan sesuatu yang sudah ada begitu saja. Kekuasaan adalah relasi-relasi yang bekerja dalam ruang dan waktu tertentu. Menyatukan partai menjadi koalisi besar adalah merajut relasi yang pada dasarnya mempunyai kepentingan yang sama untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah, tetapi di dalam koalisi besar tersebut terdapat berbagai kekuatan dan kepentingan yang berbeda.

### **Pergulatan Politik Kuasa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012**

Pendaftaran calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan mulai tanggal 24-30 Juli 2012. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2012 PDIP dengan 16 kursi berkoalisi dengan Partai Demokrat dengan menguasai 5 kursi mengusung pasangan calon Agung Bharata dengan I Made Mahayastra, melawan koalisi yang dikomandoi partai Golkar dengan 6 kursi, PDP 3 kursi, partai Hanura 3 kursi, PNBK 5 kursi, PPIB 2 kursi, dan PNI Marhaen 2 kursi. Mengusung pasangan calon Cokorda Putra Nindia berpasangan dengan Anak Agung Ngurah Agung.

### **Pergulatan Politik Kuasa Terbentuknya Pasangan Calon Tjokorda Gede Putra Nindia dengan Anak Agung Ngurah Agung (Ning)**

Tokoh Puri Agung Peliatan Ubud Tjokorda Gede Putra Nindia atau Cok Nindia berpasangan dengan Anak Agung Ngurah Agung dari Puri Gianyar (Ning) yang direkomendasikan DPP Partai Golkar. Proses keluarnya rekomendasi paket Ning sebagai calon Bupati-calon Wakil Bupati Kabupaten Gianyar diwarnai sederet ketegangan, bahkan sampai ada ancaman mundur. Semua berawal dari hasil survey yang dilakukan DPP Partai Golkar, Bupati Gianyar *incumbent*

Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace menduduki *rating* tertinggi dalam survey. Tetapi Cok Ace menegaskan tidak maju lagi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar, sehingga diputuskan Cok Nindia yang menduduki peringkat kedua sebagai calon Bupati (Nusa Bali, Jumat 6 Juli 2012). Setelah mendapatkan rekomendasi pasangan Ning melakukan pendaftaran tanggal 29 Juli 2012 yang diiringi para relawan, simpatisan, kader partai pendukung dengan menampilkan parade seni dan budaya.

Cok Nindia sebagai Sekretaris Daerah kabupaten Gianyar yang masih aktif setelah mendaftarkan diri sebagai calon Bupati, mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 7 ayat (2) huruf t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.



Gambar 1. Cokorda Putra Nindia dan Anak Agung Gede Agung

Sumber: <http://coknindia.blogspot.com>,2012

Modal simbolik yang dimiliki Cok Nindia, sebagai tokoh puri keturunan Kestrya Dalem Sukawati yang keluarganya tersebar di Kabupaten Gianyar dengan banyak pengikutnya dan sebagai sekretaris daerah menjadi daya tarik partai koalisi untuk menjadikan sebagai calon kepala daerah

Kabupaten Gianyar. Atribut-atribut yang dimiliki tersebut sebagai modal sosial untuk melakukan koneksi dan jaringan dengan orang lain. Bourdieu yang dikutip Lubis (2014:124) mengatakan, modal sosial adalah martabat dan kehormatan yang bisa menjadi sesuatu yang mendasar untuk menarik klien pada posisi sosial penting dan bisa menjadi alat tukar misalnya dalam karier politik.

### **Pergulatan Politik Kuasa Terbentuknya Pasangan Calon Anak Agung Bharata dengan I Made Mahayastra (Bagus)**

Pergulatan memperebutkan calon Bupati Gianyar di internal PDIP untuk pemilihan kepala daerah tahun 2012, berakhir dengan dikeluarkannya surat DPD PDIP Bali Nomor 698/IN/DPD/-02/IV/2012-04-16 tertanggal 9 April 2012 yang menugaskan Agung Bharata sebagai calon Bupati Gianyar pemilihan kepala daerah tahun 2012. Surat penugasan ini memupus harapan tiga kader PDIP Gianyar yang selama ini diwacanakan maju ke pemilihan kepala daerah tahun 2012 yaitu I Made Mahayastra, Nyoman Parta, dan Made Budiasa. Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2012 Agung Bharata di paketkan dengan I Made Mahayastra yang juga sebagai ketua DPC PDIP kabupaten Gianyar. Setelah pasangan mendapatkan rekomendasi DPP PDIP, pergulatan antar kader berakhir mereka menyatu mendukung pasangan Bagus.



Gambar 2. Anak Agung Bharata dengan Made Mahayastra

Sumber:kpu-gianyar.go.id,2012

Pendaftaran pasangan Bagus di kantor KPUD Gianyar dilaksanakan Rabu 25 Juli 2012, diiringi para relawan, simpatisan, kader partai pendukung dalam bentuk parade budaya sebagai atraksi politik, karena sejumlah potensi seni dan budaya di masing-masing kecamatan ditampilkan. Meskipun masa kampanye belum dimulai, dalam pendaftaran pasangan calon pun kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kepada masyarakat sudah ditampilkan, apalagi dalam pendaftaran pasangan calon diantar oleh tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kelompok. Kemasan acara dalam pendaftaran pasangan calon ke KPUD Kabupaten Gianyar yang sangat atraktif bisa menambah citra pasangan calon. Pencitraan politik sangat diperlukan untuk memengaruhi pemilih dengan cara menanamkan opini positif kepada masyarakat. Menurut Pilliang yang dikutip Pahmi (2010:7) politik pencitraan adalah sesuatu yang tampak oleh indera, tetapi tidak memiliki eksistensi substansial, karena ketertutupan realitas.

Pemilihan kepala daerah tahun 2012 terjadi pertarungan dua saudara yaitu Agung Bharata dengan adiknya Agung Ngurah Agung, dan Cokorda Putra Nindya juga masih ada hubungan keluarga dengan Agung Bharata. Pertarungan ini tidak terhindarkan karena pada awalnya Agung Bharata tidak ada niat untuk mencalonkan diri lagi menjadi kepala daerah tetapi karena penugasan dari partai tidak bisa dihindarkan.

Penugasan partai kepada Agung Bharata menjadi calon kepala daerah tidak terlepas dari dukungan masyarakat Gianyar dilihat dari survey yang dilakukan. Menurut Foucault yang dikutip Haryatmoko (2016:9) “kekuasaan itu memesona. Orang rela menderita demi kekuasaan”. Dalam perebutan kekuasaan tentu ada yang menang dan ada yang

kalah. Pertarungan antar saudara dalam memperebutkan kekuasaan di jaman modern ini jarang terjadi. Menjadi kepala daerah sebagai penguasa di daerah tentu mempunyai kekuasaan. Kekuasaan mengatur semua sistem pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.

### **Pergulatan Politik Kuasa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018**

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia 27 Juni 2018 diikuti 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pemilihan kepala daerah kabupaten Gianyar tahun 2018 diawali dengan keputusan KPU kabupaten Gianyar Nomor 274/Kpts/KPU-Kab.016.433758/VII/2017 tentang Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2018. Sampai batas akhir pendaftaran pasangan calon yang dimulai tanggal 1 sampai 7 Januari 2018, terdaftar dua pasangan calon. PDIP dengan 16 kursi berkoalisi dengan partai Hanura dengan 3 kursi, dan PAN. Mengusung pasangan calon Bupati I Made Mahayastra dan Agung Mayun sebagai calon Wakil Bupati Gianyar. Berhadapan dengan koalisi yang dipimpin partai Golkar dengan 7 kursi, Gerindra 5 kursi, partai Nasdem 2 kursi, PKPN 2 kursi, dan partai Demokrat dengan 5 kursi. Pasangan calon yang diusung Tjokorda Kertyasa sebagai calon Bupati Gianyar dengan Pande Maharani Primadewi sebagai calon Wakil Bupati Gianyar.

### **Pergulatan Politik Kuasa Terbentuknya Pasangan I Made Mahayastra dengan Agung Mayun (AMAN)**

Banyaknya kader partai potensial membuat geliat politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gianyar cukup ramai. Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar 2018 pergulatan politik antar kader PDIP terjadi cukup menarik. I Made Mahayastra-Agung Mayun (AMAN) yang digadang-gadang bakal diusung PDIP mendapat tantangan dari internal partai. Nyoman Parta anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Gianyar menyatakan siap maju ke pemilihan kepala daerah 2018 melalui proses penjarangan dan penyaringan. Alasan Nyoman Parta maju ke pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar, karena banyaknya desakan pendukung dan tokoh dari Gianyar. Gerakan mendukung Parta ditunjukkan masyarakat dengan mendatangi rumahnya, ada juga mendukung dengan memasang baliho secara sukarela. (NusaBali.com. 23/6/2018).

Proses penjarangan PDIP menentukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati diadakan *fit and proper test*. Konstelasi perebutan rekomendasi di PDIP Gianyar memasuki titik puncaknya. Gerbong I Made Mahayastra-Agung Mayun melawan Nyoman Parta dengan jargonnya "Rakyat Adalah Nyawa". Akhirnya minggu 26 Nopember 2017 diumumkan pasangan calon yang mendapatkan restu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri adalah pasangan I Made Mahayastra-Agung Mayun. (BaliExpress, 27 Nopember 2017). Setelah secara resmi rekomendasi di keluarkan gerbong I Made Mahayastra dan Nyoman Parta menjadi satu kembali dalam barisan tim pemenangan paket AMAN.

Pasangan Mahayastra-Agung Mayun dalam memantapkan dukungannya juga menggunakan jargon "Salam satu jalur" dalam kampanyenya. Pemilihan kepala daerah tahun 2018 merupakan pemilihan serentak bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bali pasangan Koster-Ace dan pemilihan

Presiden dan wakil Presiden pasangan Jokowi-Makruf Amin, yang diusung oleh PDIP sebagai pengusung utama dan beberapa partai lain yang berbeda dalam tiap tingkatannya.

### **Pergulatan Terbentuknya Pasangan Tjokorda Raka Kertyasa dengan Pande Istri Maharani Prima Dewi (Kertha-Maha)**

Kabupaten Gianyar di dalam persiapan pemilihan kepala daerah suhu politiknya sudah mulai berdenyut, diawali dengan terbentuknya koalisi empat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Gianyar Bangkit (KGB) yang di deklarasikan pada Jumat 16 Juni 2017 di *stage* Sidan kecamatan Gianyar. Empat partai itu di antaranya partai Gerindra, Demokrat, PKPI, dan Golkar. Hadir dalam acara tersebut dari tokoh masyarakat dan tokoh puri yang ada di Gianyar yaitu dari puri Ubud, puri Peliatan, puri Blahbatuh, puri Sukawati, dan puri Payangan. (Balipuspanews.com/16/06/2017).

KGB menjaring calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkembang di masyarakat untuk dipaket menjadi pasangan calon yang kuat sehingga dapat mengalahkan pasangan calon dari koalisi lawan. Adapun tokoh-tokoh Gianyar yang melamar melalui KGB sebagai bupati yakni Tjokorda Raka Kerthayasa alias Cok Ibah politisi Golkar asal Puri Agung Ubud, I Made Dana asal Desa Taro Kecamatan Tegallalang Ketua DPC Perindo Gianyar. Sedangkan yang melamar sebagai calon wakil bupati, Pande Istri Maharani Primadewi asal Desa Beng Kecamatan Gianyar bendahara partai Demokrat Gianyar, A.A. Gede Wisnawa Putra politisi partai NasDem asal puri Anyar Saraswati, Gianyar, Dewa Putu Wardana mantan politisi PDIP dan Wakil Bupati Gianyar 2003-2008. Juga muncul nama-nama, Tjok Putra Pemayun, Ketut Jata, Made Candrayani dan Ida Bagus Gaga Saputra.



Gambar 3. Rekomendasi Partai Golkar terhadap pasangan Kertha-Maha  
Dokumen: Kumparan.com

Sebelum pendaftaran Cok Ibah ke KGB telah diadakan mekanisme penjaringan dan penyaringan di partai Golkar. Cok Ibah resmi menjadi calon Bupati dari partai Golkar. Pendaftaran Cok Ibah ke Koalisi Gianyar Bangkit (KGB) diantar oleh tokoh-tokoh Puri Ubud termasuk Cok Wah, yang menandakan bahwa keluarga besar Puri Ubud sudah menyatu dalam memberi dukungan.

Setelah melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan di Partai Golkar, Tjokorda Raka Kerthayasa yang di panggil Cok Ibah resmi menjadi bakal calon Bupati dari Partai Golkar dan langsung di daftarkan ke Koalisi Gianyar Bangkit (KGB). Setelah itu proses penyaringan dan penentuan bakal calon bupati yang akan di usung KGB, menjadi ranah KGB untuk menentukan pilihannya. Sebelum Cok Ibah didaftarkan sudah ada kandidat lain yang mendaftar di KGB yaitu Made Dauh Wijana dan paket Made Dana dengan Dewa Wardana. (Bali Express, 29 Juli 2017).

Kekuatan finansial menjadi salah satu pertimbangan untuk bisa menjadi calon kepala daerah, karena dalam proses pemilihan kepala daerah di internal tim pemenangan diperlukan dana untuk memperlancar kegiatan tersebut. Seperti dana untuk pembelian alat peraga, biaya untuk sosialisasi kepada masyarakat, honor saksi pada saat pemilihan dan dana-dana lainnya.

Kapital ekonomi menurut Bourdieu yang dikutip Haryatmoko (2016:45), merupakan sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Kapital ekonomi adalah modal yang dimiliki berkaitan dengan harta benda (kekayaan, uang) yang dimiliki seseorang. Kapital ekonomi paling mudah dikonversikan kekapital-kapital lain. Dengan adanya modal ekonomi dapat melanjutkan pendidikan sehingga mempunyai pengetahuan akademis sebagai modal budaya/symbolik. Melihat kapital ekonomi dan budaya yang dimiliki oleh Cokorda Raka Kertyasa dan Pande Istri Maharani Prima Dewi dan jaringan yang luas menjadikan pertimbangan yang utama terpilihnya pasangan ini. Pendaftaran paket Kerta-Maha dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Januari 2018 di kantor KPUD Gianyar.

#### **Pergulatan Politik Kuasa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024.**

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar tahun 2024 dilaksanakan tanggal 27 Nopember 2024. Pemilihan kepala daerah tahun 2024 dilaksanakan secara serentak untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar tahun 2024 pasangan I Made Mahayastra dengan Agung Mayun mendapatkan kemenangan dengan perolehan suara 255.491 (81.14%), mengalahkan pasangan Anak Agung Kakarsana dengan I Wayan Tagel Arjana dengan perolehan suara 59.382 (18.86%). Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) 392.652 pemilih, sedangkan yang ikut memilih berjumlah 314.874 (82.45%).

#### **Pergulatan Terbentuknya Pasangan I Made Mahayastra dengan Agung Mayun (AMAN)**

Pasangan petahana I Made Mahayastra dengan Agung Mayun

keduanya kader PDIP didukung oleh PDIP dengan 31 kursi, Partai Demokrat dengan 3 kursi, Perindo dengan 1 kursi, dan partai Hanura. Mulusnya pasangan ini mendapatkan rekomendasi DPP PDIP untuk dicalonkan kembali dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar tahun 2024 tidak mendapat hambatan dari siapapun baik dari internal PDIP maupun dari kekuatan eksternal. Menurut I Ketut Sudarsana sekretaris DPC PDIP Gianyar mengatakan: “PDIP Gianyar tidak main-main dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini, apalagi PDIP Gianyar mendapatkan kursi 31 dari 45 kursi yang ada di DPRD kabupaten Gianyar dan pasangan ini pada pemerintahan sebelumnya cukup berhasil dalam membangun kabupaten Gianyar, sehingga pembagunan kabupaten Gianyar perlu dilanjutkan pada periode selanjutnya. Berdasarkan keberhasilan pasangan petahana ini maka, DPC PDIP Gianyar mencalonkan kembali I Made Mahayastra dan Agung Mayun untuk pemilihan kepala daerah kabupaten Gianyar tahun 2024. (Gianyar Gesuri.id).

#### **Pergulatan Terbentuknya Pasangan Anak Agung Kakarsana dengan I Wayan Tagel Arjana.**

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gianyar dalam pemilihan kepala daerah Gianyar tahun 2024 untuk mencari pasangan calon kepala daerah melakukan survey. Adapun tokoh-tokoh yang disurvei adalah I Wayan Tagel Arjana (Ketua DPC Gerindra Gianyar), I Made Dauh Wijana (Sekretaris DPD Golkar Bali), A.A. Alit Kakarsana (*Penglingsir* Puri Blahbatuh), I Made Wisnu Wijaya (mantan Sekretaris Daerah kabupaten Gianyar). Menurut Made Dauh Wijana survey tahap pertama, berbicara tentang tingkat popularitas dan elektabilitas dilanjutkan dengan survey kedua untuk simulasi pasangan calon, dan survey ketiga penguatan pasangan calon,

apa ada yang harus diperbaiki. (Pikiran Rakyat Bali, Rabu 10/7/2024).

Setelah melalui pergulatan yang cukup panjang akhirnya partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam Pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar 2024 mengusung paket Anak Agung Alit Kakarsana dan I Wayan Tagel Arjana sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Agung Kakarsana adalah *penglingsir* Puri Agung Blahbatuh, sedangkan Tagel Arjana merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Gianyar. detikBali, (12/8/2024).

Selain partai Gerindra dengan perolehan 4 kursi pasangan Anak Agung Kakarsana dan I Wayan Tagel Arjana (KATA) juga didukung oleh partai Golkar dengan 5 kursi, Nasdem dengan 1 kursi, PSI, PAN, PBB, dan partai Gelora. Pasangan ini resmi mendaftar ke KPUD Gianyar, rabu 28 Agustus 2024 yang diantar oleh warga yang berprofesi sebagai petani, nelayan, peternak, seniman, budayawan dan spiritual. Sebelum melakukan pendaftaran di KPUD Gianyar, pasangan Anak Agung Kakarsana dengan I Wayan Tagel Arjana (paket KATA) melakukan persembahyangan bersama dan mendeklarasikan diri *sekala niskala* di Pura Durga Kutri, Desa Buruan Blahbatuh. (Tribun Bali.com)

Pemilihan kepala daerah era reformasi di Kabupaten Gianyar telah berlangsung empat kali pemilihan, belum ada yang muncul dari jalur *independen*. Pasangan pemenang adalah yang didukung oleh beberapa partai, PDIP sebagai partai besar di kabupaten Gianyar pada pemilihan kepala daerah langsung tahun 2008 dapat di kalahkan oleh koalisi partai kecil, setelah berkoalisi dengan partai Demokrat pada pemilihan tahun 2012 dan dengan partai Hanura, PAN, di tahun 2018 dan di tahun 2024 kembali berkoalisi dengan partai Demokrat, Perindo, dan Hanura, dapat memenangkan pemilihan kepala

daerah dengan persentase yang tinggi. Fenomena ini menggambarkan diperlukan kecerdasan pada pimpinan partai politik untuk memilih pasangan calon yang akan diusung, serta di perlukan integritas yang baik dari semua tim pemenang. Karena kesalahan sedikit saja akan menjadi titik lemah untuk diserang oleh tim lawan. Pemilihan kepala daerah era reformasi telah terjadi rivalitas yang klasik antara PDIP dengan partai Golkar dan antara puri Ubud dengan puri Gianyar di periode 2008-2018 dan di tahun 2024 muncul kekuatan baru yaitu partai Gerindra dan puri Blahbatuh.

## KESIMPULAN

Pergulatan politik kuasa terbentuknya pasangan calon kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui tokoh-tokoh partai, *penglingsir* puri, dan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk memenangkan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gianyar partai politik masih sangat tergantung peran tokoh/*penglingsir* puri untuk ikut berkontestasi baik sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah. Pergulatan partai politik dalam membentuk pasangan calon terbelah menjadi dua koalisi yaitu PDIP dengan didukung tokoh Puri Gianyar dan Golkar yang didukung Puri Ubud serta di tahun 2024 muncul kekuatan baru yaitu partai Gerindra dan tokoh Puri Blahbatuh. Tokoh partai, tokoh/*penglingsir* puri dan tokoh masyarakat yang mendapatkan rekomendasi sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah adalah mereka yang mempunyai modal budaya, modal simbolik dan modal ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Huda, Ni'Matul. Nasef, Imam. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta
- Pahmi SY.2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press (GP Press)

### Peraturan-peraturan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

### Sumber Koran dan Internet

- Bali Expres, 27 Nopember 2017
- Coknindia.blogsport.com
- NusaBali.com, 23 April 2018
- Gianyar Gesuri.id.
- Pikiran Rakyat Bali, (Rabu 10/7/2024).
- detikBali, (12/8/2024).